



BPK Kalbar Gelar Audit Perdana

PAD Sumbang 8

Persen APBD

SINTANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat mulai melakukan audit perdana terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang. Pemeriksaan yang berlangsung selama 20 hari ini menitikberatkan pada kemandirian keuangan daerah, mengingat kontribusi PAD Sintang saat ini baru sekitar 8 persen dari total APBD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif. "Serahkan data dan informasi yang lengkap kepada auditor BPK. Diskusikan juga bagaimana agar ke depan PAD bisa dikelola lebih rapi," ujarnya, Senin (25/8).

PAD Sintang yang masih rendah menjadi salah satu tantangan besar dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Audit ini diharapkan

memberi gambaran menyeluruh sekaligus rekomendasi perbaikan tata kelola pendapatan. Inspektur Kabupaten Sintang, Ardatin, menyebut audit ini sebagai terobosan.

Jika sebelumnya BPK lebih banyak memeriksa penggunaan anggaran belanja, kini fokus dialihkan pada sisi pendapatan.

"Biasanya yang diperiksa

BPK itu belanja, sekarang pengelolaan pendapatan juga diperiksa. Ini penting agar pengelolaan lebih benar dan maksimal," jelasnya. Dengan audit perdana

ini, Pemerintah Kabupaten Sintang berharap kontribusi PAD bisa meningkat signifikan sehingga memperkuat APBD dan kemandirian daerah. (nda)



KUNJUNGAN: Sekda Sintang Kartiyus bersama jajaran saat menerima tim BPK Kalbar yang mulai melakukan audit perdana terhadap pengelolaan PAD.

Ist